

**PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL USAHA KEPADA NASABAH
PADA PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH
CABANG PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Prodi Perbankan Syariah



OLEH:

**MITONAH INDIRANI
NIM. 00926008882**

**PROGRAM STUDI D3PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1433H/2012**

ABSTRAK

Judul Laporan ini adalah “Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru”. Pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat membantu dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan perbaikan perekonomian menjadi lebih baik. Dalam upaya pemenuhan jasa pelayanan akan kebutuhan masyarakat pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah memberikan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Salah satu bentuk pembiayaan produktif itu adalah pembiayaan modal usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses pemberian modal usaha kepada nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, bagaimana pengaruh pembiayaan modal usaha tersebut terhadap nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman No. 628 yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Adapun subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan/ti yang bekerja di tempat tersebut serta nasabah yang mendapat pembiayaan modal usaha sebanyak 27 orang, sedangkan objek penelitian ini adalah Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.

Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pimpinan dan Karyawan/ti PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen maupun informasi dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Riau Kepri Syariah dalam memberikan pembiayaan modal usaha tersebut melalui proses dalam 7 tahap yaitu permohonan, pengumpulan data, investigasi, analisa, persetujuan, pengikatan, pencairan dan monitoring. Pihak Bank akan menetapkan ketentuan kepada pihak nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha kepada Bank berupa surat jaminan termasuk SK bagi PNS, setelah penyerahan surat jaminan pihak nasabah dapat mengisi formulir pembiayaan dan akan melalui proses selanjutnya sesuai ketentuan Bank.

Setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syariah bukan hanya berdampak pada berkembangnya usaha nasabah tetapi juga berdampak pada meningkatnya perekonomian keluarga nasabah PT. Bank Riau Kepri Syariah. Hal ini dikarenakan pendapatan nasabah tersebut menunjang perekonomian keluarga menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penelitian dan laporan akhir dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru”** ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat dan tugas guna untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan laporan akhir ini penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Mismanto dan Ibunda Sumirawati yang senantiasa memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, MA selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Pembantu Rektor dan seluruh Dosen beserta Karyawan.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu DR. Hertina, M. Pd selaku Pembantu Dekan I, Bapak Kastulani, SH, MH selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Drs. Ahmad Darbi, M. Ag selaku Pembantu Dekan III serta seluruh dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dalam proses pembelajaran dan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Kepada Ibu Zuraidah, MA. sebagai pembimbing saya yang telah ikhlas dan sabar memberikan bimbingannya selama menyelesaikan tugas ini. Tempat penulis

berkonsultasi dalam berbagai masalah perkuliahan yang penulis sadari banyak menyita waktunya, mudah-mudahan Allah yang membalas kebbaikannya.

6. Kepada Penasehat Akademis Ibu Dra. Yusliati, MA. yang telah memberi nasehat, masukan untuk perkembangan program D3 Perbankan Syariah.
7. Kepada Bapak Amrul Muzan, M.Ag yang telah dukungan untuk saya dalam penyelesaian laporan akhir ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terutama program D3 Perbankan Syariah, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik untuk kami.
9. Sahabat Setiaku Kakanda Taufik Helmas Dirgantara yang begitu setia dan sabar membantu serta senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi.
10. Untuk sahabat-sahabatku Bisri Mustofa, Desi Yunita, Detri Rutnasari, Johan, Fini Kartika, Fadli Rahman, Iche, Madiana, Putri Purnama Sari, Umi Saidah, Rheta Nurwijdah, Sonia Darnelis yang selalu senantiasa membantu dan memberikanku semangat.
11. Untuk Adikku Mitiya Ningsih, Mastura yang juga memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan laporan akhir ini,
12. Untuk semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak memberikan aspirasi baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu saya mengucapkan tahniah terima kasih yang tiada terhingga.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan akhir ini mungkin belum begitu sempurna. Oleh karena itu, jika ada saran yang baik penulis akan menerima dengan senang hati dan tidak lupa mengucapkan terima kasih guna kesempurnaan di masa mendatang. Semoga kiranya laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca lainnya.

“Jangan pernah hiraukan berapa kali kita jatuh tapi yang terpenting adalah bangkit kembali ketika telah terjatuh ”.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 07 Agustus 2012

Penulis,

MITONAH INDRIANI

00926008882

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM BANK SYARIAH	
A. Letak Geografis PT. Bank Riau Kepri Syariah	14
B. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru	15
C. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru	20
D. Produk – produk PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru .	23
E. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru	33
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pembiayaan.....	34

B. Landasan Hukum Pembiayaan.....	36
C. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37
D. Jenis – jenis Pembiayaan	38
E. Tujuan Pembiayaan.....	46
F. Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Murabahah</i> ..	46
G. Konsep PSAK No. 102 Tentang <i>Murabahah</i>	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru	58
B. Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel III.1 Keuntungan Perhitungan <i>Murabahah</i>	56
2. Tabel IV.1 Tanggapan Responden Tentang Sumber Informasi Pembiayaan Modal Usaha PT. Bank Riau Kepri Syariah.....	77
3. Tabel IV.2 Tanggapan Responden Tentang Ketertarikan Mereka Untuk Menjalin Hubungan Mitra Usaha Dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah	78
4. Tabel IV.3 Tanggapan Responden Tentang Proses Pembiayaan Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah.....	79
5. Tabel IV.4 Tanggapan Responden Tentang Keadaan Usahannya Sebelum Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Modal Usaha Dari PT. Bank Riau Kepri Syariah	80
6. Tabel IV.5 Tanggapan Responden Tentang Usahnya Setelah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syariah	80
7. Tabel IV.6 Tanggapan Responden Tentang Keadaan Ekonomi Keluarganya Setelah Memperoleh Pembiayaan Modal Usaha Dari PT. Bank Riau Kepri Syariah	81

8. Tabel IV.7 pengaruh pembiayaan dengan perekonomian keluarga

Menggunakan perhitungan chi square. 82

ANGKET

Nama :

Jenis kelamin :

Status :

A. Petunjuk pengisian

1. Angket ini semata-mata bertujuan untuk kepentingan penelitian Laporan Akhir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim
2. Jawablah pertanyaan ini secara jujur sesuai keadaan sebenarnya dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang anda anggap benar
3. Atas kesediaan anda mengisi dan mengembalikan angket ini, sebelumnya penulis ucapkan terima kasih

B. Daftar pertanyaan

1. Dari mana anda memperoleh informasi bahwa PT. Bank Riau Kepri Syariah memberikan pelayanan pembiayaan modal usaha?
 - a. Teman dan kerabat
 - b. Media massa
 - c. Karyawan/ti PT. Bank Riau Kepri Syariah
2. Mengapa anda tertarik untuk menjalin hubungan mitra usaha dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah?
 - a. Sesuai syariah
 - b. Pelayanan operasionalnya baik

- c. Marginnya jelas
3. Menurut anda bagaimana proses pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah?
- a. Mudah
 - b. Sulit
 - c. Sangat sulit
4. Bagaimana keadaan usaha anda sebelum mendapatkan bantuan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah?
- a. Biasa saja
 - b. Berkembang
 - c. Mengalami kemajuan
5. Bagaimana keadaan usaha anda setelah mendapatkan bantuan pembiayaan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah?
- a. Biasa saja
 - b. Berkembang
 - c. Mengalami kemajuan
6. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda setelah memperoleh pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah ?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik

=Terima kasih=

WAWANCARA

1. Siapa sasaran produk pembiayaan modal usaha pada PT. BRK Syariah?
2. Berapa banyak jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal usaha pada PT. BRK Syariah?
3. Apa saja akad yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha pada PT. BRK Syariah
4. Berapa besar jumlah, nominal pembiayaan modal usaha yang akan diberikan oleh PT. BRK Syariah kepada nasabah?
5. Apa saja persyaratan yang harus diajukan nasabah agar mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PT. BRK Syariah?
6. Bagaimana proses pembiayaan modal usaha kepada nasabah pada PT. BRK Syariah? (pemberian pembiayaan dan pembayarannya)
7. Apakah PT. BRK Syariah menetapkan denda terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pembiayaan modal usaha?
8. Bagaimana pengaruh pembiayaan modal usaha kepada nasabah pada PT. BRK Syariah? (terjadi perubahan atau tidak, setelah mendapat pembiayaan)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Dan juga sebagai tempat melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan.

Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa Bank. Oleh karena itu saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Fungsi kelembagaan Bank Islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal atau memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu Amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas

keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian¹.

Kemudian menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini Bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, Bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari Bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di Bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah Bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan Bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar Bank terhindar dari kerugian akibat

¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 22

tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan Bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua Bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), Letter of Credit (L/C), Safe Deposit Box, Bank Garansi, Bank Notes, Travelers Cheque dan jasa lain. Jasa-jasa Bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok Bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana².

Bank menurut UU No.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sedangkan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, sedangkan perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang, yang dalam sejarah perekonomian³.

Untuk memulai usaha diperlukan modal sebarangpun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan (Bank) menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha⁴.

Berkaitan dengan permodalan Bank Syariah, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hanya menentukan bahwa besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI (Pasal 11 UU

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet 1, hal. 4.

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: The Internasional Institute Of Islamic Thought, 2002), h. 22.

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), h. 169

Perbankan Syariah). Ini berarti, Bank Syariah harus mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, termasuk API.⁵ Bank-bank syariah dapat meningkatkan efisiensi usaha dan secara berhati-hati mengelola aktiva produktifnya, serta terlaksananya pemulihan kegiatan sektor riil, maka akan terbuka kesempatan bank-bank syariah memberikan bagi hasil yang lebih kompetitif dibanding bunga Bank dan margin jual beli, biaya sewa/fee atau tingkat bagi hasil dari sisi pembiayaan yang lebih rendah dari bunga kredit. Sebagai konsekuensinya, akan terjadi peningkatan permintaan terhadap jasa perbankan syariah, khususnya akibat pergeseran minat para nasabah yang bersifat ekonomis rasional.⁶

Penetapan kualitas pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisa terhadap faktor penilaian dengan mempertimbangkan komponen-komponen penilaian tentang prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar.⁷

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1 Oktober 2002. Restrukturisasi ini dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan tim pengembang Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi PT Bank Riau No.39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah melakukan beberapa akselerasi pendirian Bank Riau Syariah bekerja sama dengan sebuah konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun *external, marketing research, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan*

⁵ Zubairi Akbar, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),h. 59

⁶M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003), Cet. Ke-1, h. 18-19

⁷*Ibid.* h. 169

procedure. Kesiapan sumber insani juga dibekali secara intensif dengan *training*, *apprenticeship*, seminar perbankan syariah yang dilakukan oleh lembaga kala itu.

Pengajuan izin prinsip Bank Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia diperoleh pada tanggal 27 januari 2004 melalui surat BI No.6/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk renovasi gedung untuk kantor Cabang Syariah, UUS, persiapan IT syariah dan lain-lain.

Pengurusan izin operasional ke Bank Indonesia tanggal 21 mei 2004. Izin operasional diterima pada bulan juni 2004 yang memungkinkan kita untuk memulai beroperasinya Bank Riau Syariah. Pada tanggal 1 dan 22 juli 2004 dilaksanakan Soft dan Grand Opening Bank Riau Syariah yang saat itu dihadiri oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim Dan Gubernur Riau H.M Rusli Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Dr. Chaidir MM. Bank Riau Syariah Tanjung Pinang sebagai cabang kedua mulai beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006, diresmikan oleh wakil Gubernur Provinsi Riau Bapak M. Sani.

Sampai dengan bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta 1 kantor kas di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Pekanbaru di jalan KH.Ahmad Dahlan Pekanbaru serta 8 kedai layanan syariah (KLS). Dan sejak tahun 2010 Bank Riau Syariah sudah mengganti nama menjadi Bank Riau Kepri Syariah.⁸

Perkembangan PT. Bank Riau sampai saat ini yang didalamnya termasuk Bank Riau Kepri Syariah terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 17 kantor cabang konvensional, 2 kantor cabang syariah, 32 kantor cabang pembantu konvensional, 3 cabang

⁸Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah

pembantu syariah, 6 kantor kas serta 2 paymentpoint yang tersebar diseluruh kabupaten atau kota di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.⁹

Bank Riau Kepri telah lebih dari tiga tahun mengembangkan perbankan syariah. Respon dari masyarakat terus meningkat sehingga Bank Riau Kepri terus berupaya mengembangkan beragam produk berbasis syariah yang didalamnya terdapat pembiayaan dengan berbagai bentuk seperti Pembiayaan iB Pengusaha Kecil, Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan iB Niaga Prima, Pembiayaan iB Pemilikan Rumah, Pembiayaan iB Karya Prima, Pembiayaan iB Aneka Guna. Pembiayaan modal usaha pada Bank Riau Kepri Syariah yang biasa dikenal adalah pembiayaan mikro dan pembiayaan komersil.

Pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru sangat dibutuhkan oleh nasabah karena dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup manusia, dan dapat merubah perekonomian masyarakat

Dalam upaya pemenuhan jasa pelayanan akan kebutuhan masyarakat, pihak Bank syariah memberikan pembiayaan yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: akad *murabahah*, *ijarah*, dan akad *Istishna*, dan akad *Qard + Ijarah*.¹⁰ Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan untuk keperluan produksi dalam arti luas, pembiayaan produktif ini lebih bersifat suatu *utility* uang dan barang dapat terlihat dengan nyata.¹¹

⁹Lili Arni, Operasional Divisi UUS, wawancara, Tanggal 4 Juni 2012

¹⁰ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (CV Tifa Surya Indonesia, 2006), h. 212

¹¹Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), h. 244

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul : **PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL USAHA KEPADA NASABAH PADA PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG PEKANBARU.**

B. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan pengaruh pembiayaan modal usaha kepada nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses Pembiayaan Modal Usaha kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui Proses Pembiayaan Modal Usaha kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.

2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program D3 Perbankan Syaria'ah Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), metode tersebut diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru yang terletak di jalan Sudirman Pekanbaru No.628 A.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, serta nasabah Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah Pengaruh Pelayanan Pembiayaan Modal usaha kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pembiayaan yang berjumlah 4 orang dan 27 orang nasabah pembiayaan modal usaha. Mengingat populasinya tidak terlalu besar maka penulis tidak melakukan penarikan sampel. Jadi penelitian ini disebut penelitian populasi.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua data kategori yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari Pimpinan, Pegawai dan Nasabah PT. Bank Riau Kepri Syariah Riau Cabang Pekanbaru.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya buku perbankan konvensional dan buku perbankan syariah serta buku-buku lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung mengenai aplikasi item-item yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Wawancara. Melakukan wawancara langsung dengan responden baik dari karyawan PT. Bank Riau Syariah dan nasabah yang melakukan pembiayaan untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian ini.
- c. Angket. Metode dengan menyebarkan angket kepada nasabah yang berupa pertanyaan guna mengumpulkan data penelitian.
- d. Studi Dokumentasi. Penulis memakai literatur atau buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, untuk dapat menjadi bahan bacaan pendukung teori penelitian ini.

6. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam kata-kata. Hasil tidak ada hubungan antara pembiayaan dengan kesejahteraan sementara Hasilnya terdapat hubungan antara pembiayaan dan kesejahteraan.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasinya yang bersifat umum¹².
- b. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang di pandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu¹³.
- c. Komperatif, adalah untuk pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor yang berhubungan dengan situasi yang di selidiki dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Kemudian dikopromikan, jika tidak bisa di kompromikan penulis akan mencoba menganalisa data mana yang mendekati kebenaran¹⁴.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari laporan ini. Secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini membahas hal-hal yang permasalahan, batasan masalah bersifat umum seperti; Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹² Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985), h. 42

¹³ Winarno Surachmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 143

¹⁴ *Ibid.*

- BAB II : GAMBARAN UMUM**, pada bab ini membahas tentang gambaran umum yang berkaitan dengan Letak Geografis Bank Riau Kepri Syariah, sejarah singkat PT. Bank Riau Kepri Syariah, Visi dan Misi, Produk-Produk Bank Riau Kepri Syariah serta Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Syariah.
- BAB III : LANDASAN TEORI**, pada bab ini penulis menguraikan mengenai Pengertian Pembiayaan, Landasan Hukum pembiayaan, Rukun dan Syarat Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, Konsep PSAK No. 102 Tentang *murabahah*
- BAB IV : PEMBAHASAN**, Proses Pembiayaan Modal Usaha kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dan Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha kepada Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.
- BAB V : PENUTUP**, bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Letak Geografis PT. Bank Riau Kepri Syariah

PT. Bank Riau Kepri Syariah yang terletak dalam wilayah KelurahanTangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai di Jalan Jendral Sudirman No. 628 yang dulunya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau, namun dengan seiring perkembangan perbankan dan status BPD berubah menjadi PT. Bank Riau, dengan membuka Cabang Syariah yang merupakan Cabang dari PT. Bank Riau Konvensional yang selanjutnya diberi nama PT. Bank Riau Kepri Syariah.¹

Adapun mengenai batasan-batasan wilayah PT. Bank Riau Kepri Syariah ini berdasarkan letak geografisnya pada tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan rumah – rumah penduduk.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman.
- c) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cendrawasih.
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Puyuh Mas.²

Sedangkan luas wilayah PT. Bank Riau Kepri Syariah menurut penggunaannya adalah untuk fisik dari bangunan berukuran panjang 15 x 8 meter dengan desain segi panjang,permanen, memiliki 4 tingkat lantai. Lantai pertama digunakan untuk bagian pemasaran dan pelayanan nasabah yang meiputi customer

¹Qomarul Asrik, Pelaksana Pemasaran Divisi UUS PT. Bank Riau Kepri Syariah, wawancara, tanggal 4 Juni 2012

²Qomarul Asrik, Pelaksana Pemasaran Divisi UUS PT. Bank Riau Kepri Syariah, wawancara, tanggal 4 Juni 2012

service, teller dan satpam. Lantai kedua digunakan untuk bagian operasional. Lantai ketiga digunakan untuk bagian Divisi UUS dan lantai keempat digunakan sebagai ruang musyawarah.³

B. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru

Sejarah berdirinya Bank Riau Kepri Syariah tidak terlepas dari perkembangan sejarah Bank Riau yang dahulunya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau.

1. Sejarah Singkat PT. Bank Riau Kepri

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. Baperi (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Syawal Sutan No. 1 tanggal 2 Agustus 1961 dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 tanggal 12 Agustus 1961. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK. I Riau No. 51/IV/1966 tanggal 1 April 1966 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT. BAPERI. Seluruh aktiva dan pasiva pada PT. BAPERI dilebur ke Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status Bank Milik Pemerintah Daerah Riau yang didirikan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau berdasarkan SK Gubernur KDH. TK. I Riau No. SI/IV/1966 tanggal 1 april dengan modal 10.000.000,- yang terdiri dari

³Qomarul Asrik, Pelaksana Pemasaran Divisi UUS PT. Bank Riau Kepri Syariah, wawancara, tanggal 4 Juni 2012

saham Pemerintah Provinsi Riau (TK.I). Status pendirian Bank Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992. Peraturan daerah berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992. Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.⁴

Kemudian sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan PERDANo. 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan pendirian Akta Perseroan Terbatas No. 36 pada Notaris M. Dahad Umar, SH yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan surat keputusan No. C-09851.ht.01.th.2003 tanggal 5 Mei 2003 dan persetujuan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/kep.dgs/2003 tanggal 22 Juli 2003, status badan hukum Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas(PT). Pada tanggal 24 April 2010, dihadapan Notaris Fery Baki, SH Bank Riau berubah nama menjadi Bank Riau Kepri dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM pada tanggal 22 juli 2010, serta izin dari Bank Indonesia No. 12/59/kep/gbi/2010 tanggal 23 September 2010.⁵

Adapun alasan perubahan badan hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a) Memudahkan perusahaan dalam meningkatkan modal.
- b) Perseroan lebih diakui di dunia internasional.⁶

2. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru

⁴Qomarul Asrik, Pelaksana Pemasaran Divisi UUS PT. Bank Riau Kepri Syariah, wawancara, tanggal 4 Juni 2012

⁵Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah

⁶*Ibid*

Beroperasinya Bank Riau Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bahwa bunga Bank haram pada akhir 2003 dari MUI, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan di implementasikannya Bank Riau Syariah adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah memberikan peluang bagi Bank Umum Konvensional untuk ikut serta menangani transaksi Perbankan Syariah. Beberapa faktor lainnya adalah aspek marketing dimana Bank Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau Beragama Islam (prompt research, 2004).⁷

Selanjutnya aspek syariah dimana masih banyak kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan Bank konvensional yang menggunakan sistem ribawi. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi pada waktu yang lalu. Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya Bank Riau Syariah yang memenuhi segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau Syariah ataupun belum.⁸

Pada tahun 2001 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPD Riau telah disetujui prinsip pembentukan Bank Riau Syariah, kemudian di Struktur Organisasi dan Tata Kerja(SOT) telah ditetapkan pembentukan Unit Usaha Syariah.

⁷Karim Bussines Consulting (KBC) merupakan lembaga konsultasi bisnis dan perbankan syariah yang merencanakan Unit Usaha Syariah untuk PT. Bank Riau Kepri Syariah.

⁸Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah, *Op.Cit*

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan Rekstrukturisasi Organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1 Oktober 2002. Rekstrukturisasi ini kalau dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan tim pengembang Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi PT Bank Riau No.39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah melakukan beberapa akselerasi pendirian Bank Riau Syariah bekerja sama dengan sebuah konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun *external*, *marketing research*, *training*, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur. Kesiapan sumber insani juga dibekali secara intensif dengan *training*, *apprenticeship*, seminar perbankan syariah yang dilakukan oleh lembaga kala itu.

Penunjukkan H. Sumardi Usman sebagai Pimpinan Unit Usaha Syariah tanggal 1 Juli 2003 beserta tim pengembangan usaha syariah untuk mempersiapkan pendirian Bank Riau Syariah. Pelatihan dasar-dasar Perbankan Syariah dilakukan di Jakarta pada tanggal 6-8 Agustus 2003 diikuti dengan kunjungan ke BNI Syariah Jakarta dan BII Syariah. Pada tanggal 22-27 September diadakan studi banding ke Bank JABAR Syariah

sehingga menambah pengetahuan dan masukan yang positif bagi tim pengembangan usaha syariah.⁹

Pada bulan Oktober 2003 dibuat Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Karim Bussiness Consulting dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, SOP dan persiapan pembukaan Bank Riau Syariah. Selain itu ditetapkan Vendor IT yang menggarap Teknologi Sistem Informasi (TSI) Syariah yaitu Kollega Inti Pratama yang menangani Olip's Syariah yang sekarang diganti dengan PT. Sigma Cipta Caraka.¹⁰

Pengajuan izin prinsip Bank Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia di dapatkan pada tanggal 27 Januari 2004 melalui Surat BI No.6/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk renovasi gedung untuk kantor Cabang Syariah Dan UUS, persiapan IT syariah dan lain-lain.

Pengurusan izin operasional ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin opsional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan kita untuk memulai beroperasinya Bank Riau Syariah. Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan Soft dan Grand Opening Bank Riau Syariah yang saat itu dihadiri oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim Dan Gubernur Riau H.M Rusli Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Dr. Chaidir MM. Bank Riau Syariah Tanjung Pinang sebagai Cabang kedua mulai

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006, diresmikan oleh wakil Gubernur Provinsi Riau Bapak M. Sani.¹¹

Sampai dengan bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta 1 kantor kas di kantor pimpinan wilayah Muhamadiyah Pekanbaru di jalan KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru serta 8 Kedai Layanan Syariah (KLS). Dan sejak tahun 2010 Bank Riau Syariah sudah mengganti nama menjadi Bank Riau Kepri Syariah.

Saat ini PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 17 Kantor Cabang Konvensional, 2 Kantor Cabang Syariah, 32 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, 3 Cabang Pembantu Syariah, 6 Kantor Kas serta 2 Paymentpoint yang tersebar diseluruh Kabupaten atau Kota di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.¹²

C. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Syariah

Manajemen Kantor Bank Riau kepri Syariah selalu memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang, meskipun perekonomian Indonesia masih mengalami gejolak perekonomian yang belum stabil. Dengan adanya gejolak Perekonomian Indonesia maka sangat mempengaruhi pertumbuhan Perekonomian Daerah khususnya Bank Riau Kepri, karena sebagian besar nasabah terdiri atas pengusaha mikro yang melakukan usaha produksi secara lokal dan usaha perkebunan rakyat yang meliputi perkebunan karet dan sawit.

¹¹*Ibid*

¹²Lili Arni, Operasional Divisi UUS, *wawancara*, tanggal 12 Juni 2012

Dengan adanya usaha dibidang Perbankan dan Jasa Keuangan yang senantiasa berorientasi kepada peningkatan profit bagi perusahaan, maka perumusan visi dan misi sebagai pedomannya. Adapun visi dan misi Bank Riau Kepri adalah:

Visi:

“Bank Riau Kepri Merupakan Perusahaan Perbankan Yang Mampu Berkembang Dan Terkemuka Di Daerah, Memiliki Manajemen Yang Propesional Dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah Sehingga Dapat Memberdayakan Perekonomian Rakyat”¹³

Misi:

“Dalam pencapaian visi tersebut, pihak manajemen Bank Riaukepri menyusun rangkaian langkah-langkah berupa misi yang digunakan sebagai penentuan arah kebijakan manajemen tersebut, yaitu:

1. Sebagai Bank Sehat, elit dan merakyat.
2. Sebagai pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
3. Sebagai pengelola Dana Pemerintah Daerah.
4. Sebagai sumber Pendapatan Daerah.
5. Membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.”¹⁴

Motto :

Agar terwujudnya visi dan misi tersebut, bank telah menetapkan mottonya yaitu “Tumbuh Kembangkan Usaha”¹⁵

¹³ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Pada PT. Bank Riau Kepri juga memiliki filosofi logo, dan logo tersebut dipakai juga pada PT. Bank Riau Kepri Syariah yang menjadi ciri khas yang pada awalnya berbentuk Bank Pembangunan Daerah Riau yang filosofinya sebagai berikut:

a. Layar Berkembang

Layar adalah simbolisasi adanya aktivitas dan dinamika kehidupan masyarakat sehubungan dengan transportasi air. Layar berkembang merupakan interpretasi dari:

- a) Simbol kedaerahan Riau yang khas.
- b) Semangat menjaga keteguhan dalam keimanan
- c) Terjaganya keutuhan dalam kesatuan identitas
- d) Kesiapan mengurangi perjalanan atau menuju satu tujuan yang lebih baik

Tiga layar berkembang adalah lambing dari filosofi Teguh, Utuh, Dan Tumbuh identitas Bank Riau sebagai landasan dalam setiap aktivitasnya.

b. Teguh

Dengan spirit teguh Bank Riau mewujudkan integritas sebagai bank yang memegang teguh norma-norma keimanan yang berlaku. Konsisten dengan komitmen yang telah disepakati, serta tegas dalam kebijakan.

c. Utuh

Menggambarkan keterpaduan antara beberapa unsur yang menyatu sehingga menjadi utuh dan solid serta “ kompak” dalam satu sinergi.

sebagai Bank Daerah, Bank Riau terus membina interaksi antar insan Bank Riau dan kemitraan dengan masyarakat atau nasabah melalui kerja sama dan layanan terbaik.

d. Tumbuh

Bank Riau terus tumbuh, maju, progresif, dinamis. Kredibel dengan kinerja unggul dan performa prima, serta inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶

D. Produk-produk PT. Bank Riau Kepri Syariah

1. Penghimpunan Dana Bank Riau Syariah

a. Tabungan iB sinar

Tabungan iB sinar adalah tabungan yang berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah. Dengan prinsip ini tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi dan tabungan diperlukan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan profesional dan memenuhi kaidah syariah.

a. Tabungan iB sinar memiliki manfaat diantaranya:

- 1) Setoran awal pembukaan rekening hanya Rp. 50.000,-
- 2) Dapat melakukan penarikan tunai di ATM Bank Riau, 13.000 ATM bersama
- 3) Dapat melakukan penarikan tunai di 6.500 ATM MPES Malaysia

¹⁶ *Ibid*

- 4) Kemudahan transaksi tarik dan setor tunai di seluruh jaringan kantor Bank Riau Syariah.
 - 5) Kami ada di seluruh Kabupaten dan kota Se-Provinsi Riau dan KEPRI
 - 6) Diikut sertakan dalam undian berhadiah
 - 7) Aman dan sesuai syariah
- b. Tabungan iB Sinar Mahasiswa
- 1) Setoran awal pembukaan rekening hanya Rp. 50.000,-
 - 2) Dapat melakukan penarikan tunai di ATM Bank Riau, 13.000 ATM bersama
 - 3) Kemudahan transaksi tarik dan setor tunai di seluruh jaringan kantor Bank Riau Syariah.
 - 4) Diikut sertakan dalam undian berhadiah
 - 5) Aman dan sesuai syariah
- c. Tabungan iB Dhuha (haji dan umrah)

Tabungan iB dhuha adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji plus umroh. Kini tabungan iB Dhuha ada dua yaitu simpanan bersifat wadiah atau titipan sehingga nasabah bebas kapan saja merencanakan waktu keberangkatan haji atau umroh serta bebas menentukan nominal setoran berdasarkan kemampuan dengan kontrak bagi hasil dari keuntungan usaha Bank namun waktu dan

keberangkatan serta jumlah setoran perbulannya direncanakan sesuai keinginan nasabah. Tabungan iB Dhuha manfaat yaitu:

- 1) Tabungan pembiayaan untuk ibadah haji siskohat, Haji Plus Umrah.
- 2) Bebas biaya administrasi pembukaan rekening
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Kemudahan melakukan setoran cabang PT. Bank Riau
- 5) Perlindungan asuransi jiwa sampai jumlah tabungan tertentu.

d. Deposito iB

Deposito iB adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan pihak bank. Deposito iB memiliki manfaat diantaranya yaitu:

- 1) Bagi hasil yang menarik
- 2) Jangka waktu yang fleksibel
- 3) Dapat dijadikan agunan pembiayaan

e. Giro iB

Giro iB adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pelayanan lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Giro memiliki manfaat, diantaranya yaitu:

- 1) Fleksibel dalam bertransaksi
- 2) Dapat digunakan sebagai referensi bank

- 3) Meningkatkan citra pribadi dan perusahaan
- 4) Memberikan kemudahan dan kenyamanan
- 5) Praktis dan akurat

f. Gadai Emas iB (Rahn)

Gadai emas iB adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank Riau Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai.

Manfaat dari rahn ini ialah:

- 1) Solusi dana cepat sesuai syariah
- 2) Proses cepat, tidak membutuhkan waktu lama untuk memperoleh uang tunai
- 3) Persyaratan mudah dan ringan
- 4) Biaya relatif murah
- 5) Dilaksanakan sesuai dengan syariah sehingga memberikan hasil barokah
- 6) Ada ketentraman karena barang anda aman
- 7) Jangka waktu pinjaman sampai 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang

g. iB Aneka Guna

iB aneka guna adalah pembiayaan tanah untuk perumahan, pembangunan, renovasi rumah tinggal. Pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

h. iB Kendaraan Bermotor

iB kendaraan bermotor adalah pembiayaan yang di berikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesional dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan diatasnya (rumah,ruko, dan lain-lain)

2. Pembiayaan Bank Riau Syariah

- a) iB Karya Prima
- b) iB Modal Kerja Niaga Prima
- c) iB Investasi Bina Prima
- d) iB Pengusaha Kecil

3. Jasa Perbankan

- a) Kliring
- b) Bank garansi iB
- c) Referensi Bank
- d) Surat Dukungan Bank
- e) Inkaso
- f) Kiriman uang iB
- g) Dan fasilitas ATM dengan berbagai transaksi.¹⁷

E. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Syariah

Suatu perusahaan dalam melakukan atau menjalankan kegiatan perusahaannya agar lebih baik sesuai dengan kebutuhannya tidak terlepas dari suatu system organisasi. Dan struktur organisasi perusahaan dikatakan baik dalam

¹⁷*Ibid*

melakukan atau menjalankan kegiatan perusahaannya apabila bentuk dari struktur tersebut sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari organisasi.

Dalam penyusunan struktur organisasi ada hal yang penting untuk diketahui yaitu tentang wewenang dan tanggung jawab setiap bagian dan setiap karyawan. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, manajemen bank membentuk organisasi sesuai dengan kebutuhan dan jenis kegiatan perusahaan.

Gambaran umum mengenai Susunan Pembagian dan Pelaksanaan Tugas dari masing-masing Struktur Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah

Adapun yang membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi Operasional Bank dan Produk-Produk agar sesuai dengan Tuntutan Syariah. Penetapan Dewan Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah para anggota DPS itu mendapat Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan pengawas syariah Bank Riau Kepri Syariah terdiri dari ketua dan 2 orang anggotanya, yang ketuanya adalah Drs. H. Muchtar Samad. Fungsi dewan pengawas syariah pada Bank Riau Kepri Syariah adalah:

- a. Mengawasi jalannya Operasionalisasi Bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (setahun sekali) bahwa Bank Riau Kepri Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

- c. Meneliti dan membuat Rekomendasi Produk Baru dari Bank Riau
Kepri Syariah

2. Unit Usaha Syariah

Tugas-tugas unit usaha syariah diantaranya:

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah.
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran dasar Unit Usaha Syariah serta melakukan monitoring dan pengendalian kas pelaksanaannya.
- c. Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan Usaha Syariah.
- d. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha di bidang Pembiayaan dan Investasi serta Operasional Syariah.
- e. Menangani mengenai Talangan Haji.
- f. Menghitung Bagi Hasil, Bonus Tabungan, Giro, Deposito.

3. Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas mengelola Bank Cabang tersebut, kemudian bertanggung jawab atas kelangsungan Bank tersebut terhadap unit.

4. Wakil Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas membantu Pimpinan Cabang, kemudian mewakili tugas-tugas Pimpinan Cabang jika diperlukan.

5. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah pelayanan terhadap para nasabah dalam seksi, bagian bertugas membawahi:

- a. Pelaksanaan Deposito atau Tabungan Mudharabah. Pelaksanaan Deposito yaitu orang yang bertugas masalah-masalah deposito terutama terhadap pelayanan Deposito.
- b. Pelaksanaan Giro atau Tabungan Wadiah. Pelaksanaan Giro yaitu orang yang bertugas mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan Giro.

6. Bagian Teller, Tugasnya:

- a. Melayani nasabah untuk penarikan, penyetoran uang.
- b. Serta melayani nasabah untuk kiriman uang atau transfer uang.
- c. Memberikan uang kepada Pegawai untuk membeli keperluan kantor sesuai dengan keperluan yang tertera diperintah bayar .
- d. Membuat laporan kas secara harian

7. Bagian Costumer Service, Tugasnya:

- a. Melayani calon nasabah untuk membuat rekening tabungan, serta membuat ATM.
- b. Memberikan penerangan dan penjelesan tentang prosedur pemasukan dan pengeluaran Tabungan kepada para Penabung.
- c. Melayani nasabah untuk membuka Deposito dan juga Giro.
- d. Memberikan penerangan dan penjelesan tentang prosedur pemasukan dan pengeluaran Deposito kepada Deposan.

8. Pimpinan Seksi Pemasaran

Pimpinan Seksi Pemasaran yaitu yang bertugas dalam mengelola hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran.

a. Analisa kredit atau pembiayaan

Analisa kredit yaitu tugasnya menganalisa dan memberikan laporan aspek Yuridis mengenai permohonan pembiayaan dari nasabah.

b. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan macet

Tugasnya menyusun laporan-laporan yang berhubungan dengan pembiayaan macet.

9. Pimpinan Seksi Operasional

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah Operasional Bank.

10. Pelaksanaan administrasi pembiayaan

Bertugas mengurus masalah administrasi pembiayaan seperti sebagai berikut:

a. Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada calon Debitur.

b. Menyelenggarakan Administrasi Pembiayaan dan membuat laporan kepada direksi tentang pelaksanaan tugas.

c. Mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan pelaksanaan seksi di bawah wewenangnya.

• Seksi yang terdapat pada bagian pembiayaan yaitu:

a. Seksi kredit umum, tugasnya yaitu:

1) Memberikan penerangan dan penjelasan tentang kredit umum kepada calon debitur.

2) Membuat daftar dan tanggal realisasi pencairan kredit.

3) Memeriksa dan mengoreksi blangko permohonan kredit.

- 4) Memberikan berkas permohonan kredit kepada kepala bagian kredit.
- 5) Memproses permohonan kredit.
- 6) Mencatat semua jaminan dan menyimpan barang jaminan dengan baik.

11. Pelaksanaan Pembiayaan Konsumtif

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah pelayanan pembiayaan konsumtif

12. Pelaksanaan Akuntansi, Laporan Keuangan

Bertugas menyelesaikan laporan-laporan keuangan.

13. Satpam

Bertugas serta bertanggung jawab mengenai masalah-masalah keamanan Bank.¹⁸

¹⁸*Ibid*

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CABANG SYARIAH PEKANBARU**

Pemimpin Divisi Usaha Syariah
H. Yumadris, SE

Pemimpin Cabang
H. Khairul Ammar, SE

Wakil Pemimpin Cabang

Pinsi Pemasaran
Helwin Yunus, A. Md

Pinsi Pelayanan
Ika Febrina, S.Pi

Pinsi Operasional
Arthon Indra Jaya, SE Ak

Auditor Cabang
Juni Amrita, SE Ak

No	Account Officer
1	Komersil, Mikro dan Kecil
1	Siska Andriany, SP (PCPs 2004)
2	Astret L. Mirandha, SE (PCPs 2004)
No	Konsumer
1	Afri Eldi, S.Si (PCPs 2005)
2	Moh. Razak Hasbi, A.Md (PCPs 2008)

No	Teller
1	Mustika Puspa Rani (PTT 2011)
2	Ratna Hayati (PTT 2011)
No	Customer Service
1	Rita Wahyuni, SH (PCPs 2008)
2	Maharani Anjani Putri, SE (PCPs 2008)

No	Ass. Operasional	
1	Dyah Kumala Trisnaeni, SE (PCPs 2008)	Pelaporan
2	Sri Dewi Rezeki, S.Pd (PCPs 2004)	Kir/RTGS/OB
3	Via Dana Kristina, SE (PCPs 2006)	Adm Pembiayaan
4	Ilmiati, S. Sos (PCPs 2004)	Adm Pembiayaan
5	Haniwa Oktarini, ST, M.S.M (PCPs 2006)	Adm Pembiayaan
6	Junitun, SE (PCPs 2005)	SID
7	Muhammad Amin, SEI (PCPs 2005)	Umum
8	Mutia Oktaria, A.Md (PCPs 2005)	Umum

No	Pelaksana Internal Auditor
1	Firdaus Moeslim, ST (PCP 2009)

No	Gadai Emas (Rahn)
1	Melani Usman, SE (PCPs 2005)
2	Uffa Hayati, SE (PCPs - 2008)
3	Abdul Mubarak, SE (PCPs-2005)
4	Silvia Agriani (PCPs 2008) Cab. PSP
5	Hasfiatar (PCPs 2008) Capem Rumbai

No	Unit Layanan Syariah (PTT CS)
1	Herwati, SE
2	Hemeldo Ekki Prayudi, SE
3	Aryaldi, A.Md
4	Mahdalla, S.Pi
5	Herviza Yuni
6	Elma Yunani
7	Desmarisanti
8	Syamsiah, SE
9	Deslana Reini
10	Dorojatun Khasanah, SE
11	Amrita
12	Rahmalla Maye Sari, ST
13	Yulisa Fismadila, SH
14	Nanik Tri Handayani, A.Md
15	Nazifah, SE
16	Diona Sartika, S.Si
17	Rica Sari, S.Pi
18	Ratna Chintia Wahyuni, SE
19	Maisri Hartati, A.Md
20	Eka Anggreini
21	Mella Asriwita, Amd
22	Rico Wicaksono, SE
23	Dwi Sutri Astuti, SE
24	Fitriani, A.Md
25	Katrika Yudha S, SE
26	Destina Mayza, SE
27	Wulandari, A.Md
28	T. Desti Nurwahyu
29	Nurjannah, SH
30	Sulastri, Amd
31	Rahabiwita, SE
32	Nurjanah, SE
33	Tirta Wirya, SE
34	Maryati Uffa
35	Tri Handayani
36	Siti Fitria Hikmah

No	PEGAWAI TEKNIK	
1	Jhoni Ard Amd	Satpam
2	Robert Agustian	Satpam
3	Andri Muhandy	Satpam
4	Maman Rahmansyah	Satpam
5	Muhammad Naim	Satpam
6	Noprizal	Driver
7	Donny Kurniawan	Driver

Tingkat Pemimpin Seksi + Internal Auditor

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	LK	PR	
Pasca Sarjana	-	-	0
Sarjana	1	2	3
Sarjana Muda	1	-	1
Jumlah	2	2	4

Tingkat Pendidikan Pegawai Adm. Pelaksana + Pelaksana Internal Auditor

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	LK	PR	
Pasca Sarjana	-	1	1
Sarjana	6	12	18
Sarjana Muda	1	1	2
Jumlah	7	14	21

Jumlah Pegawai Cab.Syr PKU

pincab	1
pinsi	3
adm pelaksana	20
PTT Teller 2 (dari ULS 30)	36
pegawai teknis	7

Internal Auditor + pelaksana	67
Capem Syr Tbh	2
Capem Syr Duri	13
Capem Syr Duri	14
Jumlah	96

CAPEM SYARIAH TEMBILAHAN

CAPEM SYARIAH DURI

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹.

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pembelian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang defisit unit. Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara Bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang pendek.³

Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditanggihkan pada jangka waktu yang disepakati. Pada sisi penyalur dana (*landing of fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan

¹ Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 : Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi 6 Cet Ke-6, h.92

²M. Nur Rianto Al-arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta : ALFABETA, CV, 2010), Cet Ke-1, h.42

³Muhammad Syafi.i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta : Gema insani, 2001), Cet Ke-3, h.160

alternatif pendanaan lainnya. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998) yaitu penyediaan uang atau tagihan yang bersamaan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain, yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁴.

Pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (pinjaman) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dengan semakin, berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan kegiatan usaha akan dirasakan adanya sumber-sumber untuk menyediakan usaha yang semakin berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku atau bahan penolong, kemampuan teknologi dan manajemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.

Prinsip penyaluran pembiayaan adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, financial dan agunan. Kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni adalah memberikan pembiayaan kepada debiturnya hanya atas kepercayaan saja, dan ada jaminan lainnya. Kepercayaan *reserve* diartikan menyalurkan pembiayaan/pinjaman kepada debitur atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga Bank selalu meminta agunan berupa materi. Bahkan suatu bank dalam penyaluran pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.⁵

⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2000), h. 333

⁵Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), h. 87

⁸Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep Dan Implementasi Syariah*, (Yogyakarta: P3EI 2008), h. 159

- a. Penjual
 - b. Pembeli
2. Objek yang diakadkan
 - a. Barang yang diperjualbelikan
 - b. Harga
3. Akad/ sighthat
 - a. Serah (Ijab)
 - b. Terima (Qabul)

Dan adapun yang menjadi syarat dalam pembiayaan ini adalah:

1. Pihak yang berakad
 - a. Cakap hukum
 - b. Suka rela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan
2. Objek yang diperjualbelikan
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan/dilarang
 - b. Bermanfaat
 - c. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
3. Akad/Shigot
 - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 - b. Antara *ijab qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
 - c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang.

- d. Tidak membatasi waktu

D. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pada prinsipnya pembiayaan itu cuma satu macam saja yaitu uang Bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu dimasa mendatang, disertai dengan kontrak prestasi beserta margin⁹.

Skim pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain :

a. Pembiayaan konsumtif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan, contoh jenis pembiayaan ini adalah pembiayaan perumahan, pembiayaan kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri¹⁰.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu:¹¹

1) Pembiayaan akad *murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Kemudian Bambang Rianto memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan Adiwarman Karim dan Muhammad Syafi'i Antonio yaitu jual beli dengan harga asal di tambah keuntungan yang disepakati.¹² Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual

⁹Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), h. 212

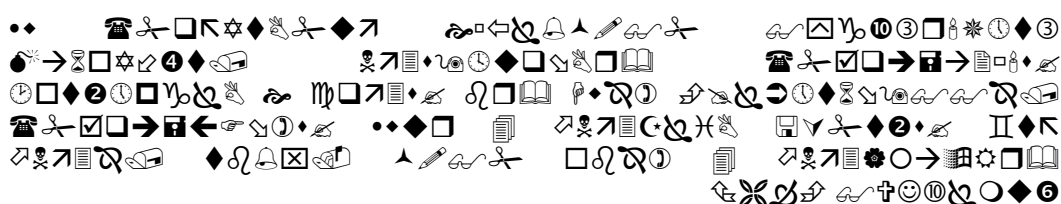
¹⁰Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2005) ,h. 43

¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 46-103

¹² Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendekia Press, 2005), h.87

beli yang terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembeli.¹³

Dengan demikian jual beli merupakan proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.¹⁴ Jual beli dapat dilakukan atas dasar suka sama suka sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. AN-NISA:29).

Kemudian jual beli juga dapat didefinisikan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimannya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syar'i dan disepakati.¹⁵

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini

¹³Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 128

¹⁴Nazar, Bakri, *Problematika Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)h. 58

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) Ed. Ke-1 h. 69

tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

2) Pembiayaan akad IMBT

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain:

- a) *Hibah* diakhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa
- b) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- c) Harga ekuivalen dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
- d) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

3) Pembiayaan Akad *Ijarah*

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini Bank) untuk membiayai aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya

membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

4) Pembiayaan Akad *Istishna*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna* salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna* muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan diawal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas dan yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna* pembayaran dapat dimuka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

5) Pembiayaan Akad *Qard*

Bank Indonesia mendefinisikan *al-Qardh* sebagai penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam waktu tertentu. Sedangkan Syafi'i Antonio memberikan pengertian *Al-Qardh* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain *al-Qardh* berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan¹⁶.

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan Bank adalah sebagai berikut:

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2001), Cet. Ke-1, h. 131

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata-mata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
- b) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*, namun jika berbentuk *good in process* yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah *process* barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih. Jika 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*, jika barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *isthisna*.
- c) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*¹⁷.

b. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan ini untuk keperluan produksi dalam arti luas pembiayaan produktif ini lebih bersifat suatu *utility* uang dan barang dapat terlihat dengan nyata.

Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua, yakni :

- 1) Pembiayaan Investasi
- 2) Pembiayaan Modal Kerja

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatan analisisnya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan *financial* pribadi dalam mengembalikan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif fokus analisa pada

¹⁷*Ibid*,h. 244

kemampuan usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Dari sisi prosesnya analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif¹⁸.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar manfaat pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal utang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkat kegunaan oleh lembaga keuangan. Para pengusaha meningkatkan pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitas, ataupun untuk usaha peningkatan produktifitas secara menyeluruh.

b) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan dana pembiayaan dapat memproduksi bahan. Jadi, sehingga *utility* dana bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memudahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang bermanfaat.

c) Pembiayaan meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan uang giral akan lebih berkembang oleh

¹⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), h.

karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif¹⁹.

d) **Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat**

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya, kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, peningkatan usaha tidaklah selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang mampuannya yang berhumagin dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pula pengusaha selalu berhumagin dengan baik untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

E. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan penyaluran pembiayaan antara lain adalah untuk :

- Memperoleh pendapatan bank dari margin pembiayaan
- Memanfaatkan dan memproduktif dana yang ada
- Melaksanakan kegiatan operasional Bank
- Memenuhi permintaan pembiayaan dari masyarakat
- Memperlancar lalu lintas pembayaran
- Menambah modal kerja perusahaan
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

F. Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*
Menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan, menetapkan: fatwa tentang *murabahah*.

¹⁹Undang-Undang Perbankan Syariah 2008, UU RI No. 21 Th 2008 (Jakarta : Sunan Grafika, 2009), h.

Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* Dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada Bank.
2. Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *ruil* Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan Dalam *Murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang Dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada Bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, maka nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran Dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut Dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta, Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420/ 1 April 2000 M.²⁰

G. Konsep PSAK NO. 102 tentang *Murabahah*

Standar akuntansi keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi *murabahah* adalah PSAK No. 59 tentang pengakuan dan pengukuran *murabahah*,²¹ dan PSAK syariah 2007 yang terdiri dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK No. 101 sampai dengan 106. PSAK No. 59 hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran *murabahah* dari perspektif Bank sebagai penjual saja, maka dirasakan belum cukup digunakan sebagai standar akuntansi keuangan yang cukup komperhensif. Dengan adanya transaksi khusus di dalam aktivitas perbankan, maka diperlukan aturan-aturan yang mengikat dan berbeda dalam perlakuan akuntansi untuk Bank syariah. Ikatan akuntansi Indonesia mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan).

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Cet Ke-1, h. 246-247

²¹Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h. 50

Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh DSN-MUI menjadi salah satu landasan penting bagi penyusunan standar akuntansi keuangan dan auditing bagi Bank dan lembaga keuangan syariah Indonesia. Biasanya dalam proses penyusunan standar akuntansi keuangan bagi Bank dan lembaga keuangan terhadap substandar. PSAK No. 102 : akuntansi *murabahah* sebagai bagian PSAK syariah, merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *murabahah*.²²

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.102 tentang akuntansi *murabahah* pada paragraph 06-17 mengenai karakteristik transaksi *murabahah* akan diuraikan sebagai berikut:²³

06. *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan Bank melakukan pembelian barang setelah penurunan dari pembelian
07. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami perubahan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan tersebut menjadi tanggungan penjual akan mengurangi nilai akad.
08. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

²² Rifqi muhammad, *Akuntansi:Keuangan Syari'ah, Konsep Dan Implementasi: PSAK Syari'ah*(Yogyakarta: P3EI,2008)

²³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 102 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Murabahah*(Jakarta: 2007)

09. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
10. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka diskon tersebut merupakan hak pembeli.
11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian pembeli;
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait pembelian barang.
12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai kesepakatan dalam akad tersebut.
13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau *asset* lainnya.
14. Penjual dapat meminta uang muka pembelian sebagai bukti komitmen pembeli sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian *riil* yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih

disiplin terhadap kewajibannya. Besar denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan yang berasal dari denda dipergunakan sebagai dana kebajikan.

16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat pada waktu; atau
- b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; atau
- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *murabahah* terhadap pengakuan dan pengukuran *murabahah* dalam akuntansi untuk dinyatakan dalam paragraph sebagai berikut:

18. Pada saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

19. Pengukuran *asset murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a. Jika *murabahah* pesanan mengikat;
 - 1. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - 2. Jika terjadi penurunan nilai *asset* karena rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai *asset*.

b. Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka;

- 1. Dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah; dan

2. Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

20. Diskon pembelian *asset murabahah* diakui sebagai:

1. Pengurangan biaya perolehan *asset murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
2. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
3. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual;
4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad

21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengambilan diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
2. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

22. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *asset murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

23. Keuntungan *murabahah* diakui:

1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau

2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*;
- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan *asset murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya *relative* kecil.
 - 2) Keuntungan diakui proposional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih *relative* besar dan atau beban untuk pengelola dan menagih piutang tersebut *relative* besar juga.
 - 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelola piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraph 23 b (2), dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan pengelikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan *asset murabahah*.
25. Berikut ini contoh perhitungan secara proposional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan asset (pokok) Rp. 800 dan keuntungan Rp. 200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

TABEL III.1
Contoh Perhitungan Keuntungan Murabahah

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

Sumber: psak no. 102

26. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
27. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - 1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
 - 2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
28. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
 - 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*.
 - 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 - 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - 2) Jika barang jadi beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)

- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

BAB IV

PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL USAHA KEPADA NASABAH PADA PT.

BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU

A. Proses Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru

Pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru kepada masyarakat yang telah menjadi nasabah Bank tersebut yang memiliki usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang bersifat konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti renovasi rumah dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan *murabahah* yang bersifat produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti untuk meningkatkan usaha baik perdagangan maupun perusahaan. Kemudian jangka waktu pembayaran sudah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, dengan minimal dana yang dikeluarkan 10 juta, dengan tingkat margin yang sudah menjadi kebijakan Bank yang akan disesuaikan dengan nasabah pembiayaan.¹

Tujuan diberikannya pembiayaan pada modal usaha ini agar dapat membantu para nasabah pemilik usaha mengembangkan usahanya atau untuk menambah modal usahanya. Persyaratan untuk memperoleh pembiayaan modal usaha pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru memiliki persyaratan tersendiri. Adapun pembiayaan modal usaha tersebut dapat berupa uang sebagai tambahan modal maupun pembiayaan modal usaha yang berbentuk penambahan beberapa unit barang. Pada pembiayaan *murabahah* terdapat prinsip pokok atau prinsip standar minimal pembiayaan *ahah* yang harus dipenuhi seperti berikut ini:

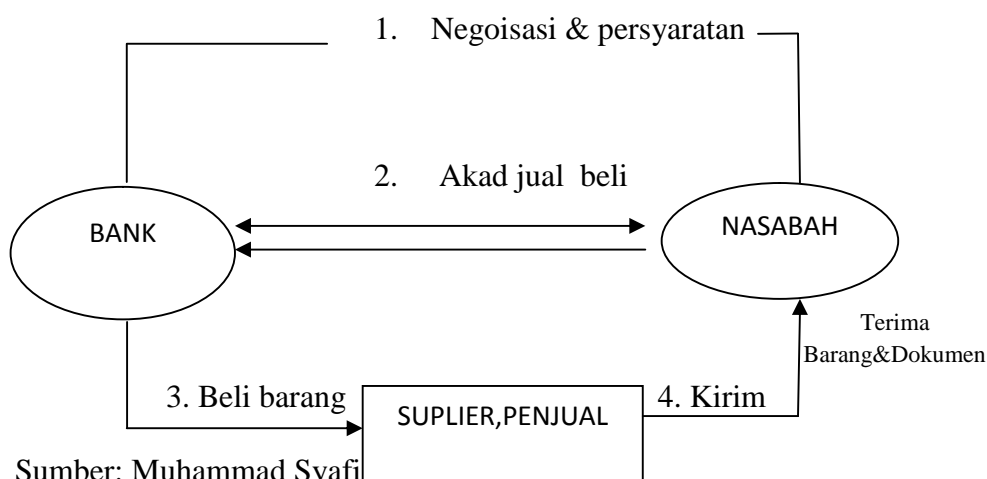
¹Siska Andriani, account Officer, wawancara, tanggal 28 juni 2012

1. *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain yang dengan peraturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan *margin* keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut.
2. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi *murabahah* haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual dan dalam penguasaan secara fisik atau *konstruktif (constructive possession)*.
3. *Murabahah* seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (*ijab* dan *qabul*) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tingkat harga yang disepakati untuk membayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).
4. Dalam transaksi *murabahah*, penunjukkan agen bila ada pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama Bank dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang *independent* satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah. Namun, suatu perjanjian menjual dapat mencakup seluruh kejadian dan dilakukan dimuka serta dapat dibuat pada saat akan memulai hubungan kesepakatan jual beli.
5. *Invoice* yang diterbitkan oleh *supplier* adalah atas nama Bank karena komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama Bank tersebut. Pembayaran harga komoditas lebih diutamakan dilakukan langsung oleh Bank kepada *supplier*.
6. Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau *default* bahwa nasabah diharuskan membayar denda yang dihitung dalam suatu persentase perhari atau pertahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebajikan oleh Bank (*qordhul hasan*).

7. Nasabah akan diminta memberikan jaminan dalam bentuk surat sanggup, hipotek, hak tanah atau bentuk aset lainnya. Namun, Bank sebagai pemegang hak dan jaminan yang dianggunkan seperti hak atas tanah maupun hak atas surat tagihan.
8. Kontrak *murabahah* tidak dapat di-*rool over* karena barang ketika dijual Bank telah menjadi hak nasabah sehingga tidak dapat dijual kembali oleh Bank.
9. Perjanjian *buy-back* dilarang. Dengan demikian, komoditas yang telah dimiliki oleh nasabah tidak dapat menjadi objek transaksi *murabahah* antara nasabah dengan Bank yang membiayai.
10. *Promisory note* atau *bill of exchange* atau bukti utang lainnya tidak dapat dipindah tangankan atau ditransfer dengan suatu harga yang berbeda dari *face value*-nya.²

Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah mengenai ketelambatan pembayaran atau pelunasan dari pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah, pihak bank tidak menerapkan sistem denda hanya saja pihak Bank akan mengirim surat peringatan. Surat peringatan tersebut bertahap diberikan kepada nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran atau pelunasan pembiayaan.³

Untuk skema pembiayaan *murabahah* dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Muhammad Syafi

²Siska Andriani, account Officer, wawancara, tanggal 28 juni 2012

³ Siska Andriani, account Officer, wawancara, tanggal 28 juni 2012

Sebelum calon nasabah (debitur) mengajukan permohonan, AO (*account officer*)⁴ terlebih dahulu memberikan informasi serta menjelaskan tentang prinsip pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru. Terutama perusahaan yang baru pertama kali mengajukan permohonan kepada Bank tersebut. Begitu juga dengan nasabah yang hanya sekedar mencari informasi tentang pembiayaan. Hal-hal yang paling prinsip yang harus diketahui oleh debitur sebelum mengajukan permohonan antara lain:

- 1) Calon nasabah atau debitur harus memiliki barang jaminan seperti SK, Sertifikat Tanah dan Surat Berharga lainnya
- 2) Calon nasabah atau debitur harus memiliki pengalaman usaha minimal selama 2 tahun
- 3) Calon nasabah atau debitur harus mengisi formulir permohonan pembiayaan, dengan mencantumkan jumlah nominal permohonan pembiayaan yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis usaha yang akan dibiayai dan hal-hal lain yang tercantum dalam formulir permohonan pembiayaan.
- 4) Jenis usaha yang akan dibiayai harus jelas dan harus sesuai Syariat Islam.

Setelah calon nasabah atau debitur mengetahui prinsip *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah, maka untuk selanjutnya calon nasabah atau debitur harus menjalani beberapa prosedur pembiayaan *murabahah* ini yakni sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama Dalam Proses Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah* adalah Pengajuan Permohonan

Sebelum pembiayaan disetujui, pihak Bank memberikan persyaratan berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan pihak PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru adalah sebagai berikut:

⁴*Account Officer* adalah pemasar merangkap analisis terhadap produk-produk pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah

- a) Surat permohonan tertulis bermaterai RP. 6000
- b) Mengisi formulir permohonan pembiayaan Bank.
- c) Foto copy KTP atau identitas suami dan istri (yang masih berlaku)
- d) Foto copy Kartu Keluarga
- e) Foto copy Surat Nikah suami dan istri (yang telah menikah)
- f) Foto copy Rekening di Bank Lain (jika ada)
- g) Foto copy Rekening Listrik atau Telpon
- h) Foto copy Sertifikat Jaminan Pembiayaan.
- i) Foto copy Slip Gaji
- j) Pas photo suami dan istri (3x4 = 2 lembar)
- k) Perizinan situ (surat izin tempat usaha dari kelurahan setempat)
- l) Perincian atau Rencana Anggaran Belanja(RAB)
- m) PBB (jaminan tahun terakhir)

Persyaratan lain khusus untuk pembiayaan di atas RP. 50.000.000,- adalah sebagai berikut:

- a) SIUP (Surat Izin Perdagangan)
- b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- c) NPWP (Nomor Pesertawajib Pajak)
- d) Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
- e) SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi)
- f) Laporan keuangan (neraca dan laba rugi) serta SPT tahunan.⁵

Dalam hal ini *account officer* harus lebih aktif dalam meminta kelengkapan dokumen yang sudah diajukan nasabah untuk menunjang proses selanjutnya sehingga memperoleh pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah.

⁵Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Syariah

2. Tahapan Kedua Dalam Proses Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Murabahah* adalah Pengumpulan Data dan Investigasi

Setelah dokumen-dokumen yang diperlukan PT. Bank Riau Kepri Syariah didasari kebutuhan dan tujuan pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru terpenuhi, pihak Bank selanjutnya akan melakukan wawancara dan kunjungan ke lapangan untuk melihat kebenaran dokumen-dokumen yang diperoleh tersebut.

Dalam melihat kebenaran informasi yang disampaikan nasabah melalui pendekatan wawancara. *Account officer* akan melihat karakter nasabah sejak awal akan mengajukan pembiayaan, apakah termasuk kategori nasabah yang jujur, dapat dipercaya serta bertanggung jawab. Begitu juga dengan kesungguhan nasabah dalam pengajuan pembiayaan akan terlihat pada nasabah dalam menyampaikan informasi.⁶

- a. *Account officer* mewawancarai yang sifatnya lebih pribadi yang berbentuk pertanyaan seperti tempat tinggal, dan jumlah anak.
- b. Inisiatif mengajukan pembiayaan ke PT. Bank Riau Kepri Syariah, hal ini akan diketahui oleh Bank sebagai pertimbangan persetujuan. Terutama informasi inisiatif pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada Bank yang tujuannya agar Bank tidak salah sasaran dalam meyetujui pembiayaan yang diajukan. Karena banyak nasabah yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mencari keuntungan sendiri, padahal nasabah kurang layak untuk mendapatkan pembiayaan dan bermasalah pada Bank lain.
- c. *Account officer* mewawancarai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran tujuan penggunaan dana dan jangka waktu pembiayaan yang diajukan

Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah*. Ketentuan untuk

⁶Siska Andriani, account Officer, wawancara, tanggal 28 juni 2012

margin merupakan kebijakan Bank yang sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan dan semua bersifat transparan. Tujuan dari mewawancarai nasabah untuk memperoleh data-data dan informasi langsung dari nasabah itu dimaksudkan agar dapat dibuktikan keberadaan sebenarnya pada saat mengecek ke lapangan dan tidak ada salah penafsiran pada kemudian hari.⁷

Adapun pengecekan melalui kunjungan ke lapangan, PT. Bank Riau Kepri Syariah melihat kelayakan dari dokumen-dokumen yang telah ada yaitu:

- a) Seperti Surat Tanah yang dijadikan jaminan
- b) Pengecekan kebenaran kepemilikan Surat Tanah tersebut
- c) Izin Usaha Legal
- d) Lokasi tujuan pembiayaan Legal dan status pemilik diakui
- e) Kondisi ekonomi nasabah untuk melihat kemampuan nasabah dalam pembayaran hutang.

3. Tahapan Ketiga Dalam Proses Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah adalah Analisa Pembiayaan

Dalam menganalisa pembiayaan, pihak bank dapat melakukan 5 metode antara lain:⁸

a. Karakter

Dalam melihat nasabah terhadap kemungkinan beritikad buruk seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana pembiayaan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:⁹

1) Wawancara

Wawancara yang lebih mengarah kekeluargaan dapat melihat karakter seseorang. Apabila nasabah dapat menjawab pertanyaan dengan mudah, yakin

⁷Siska Andriani, account Officer, wawancara, tanggal 28 juni 2012

⁸Anthon Indra Jaya, Pinsi Operasional, wawancara, tanggal 14 juni 2012

⁹Siska Andriani, account Officer, wawancara, tanggal 28 juni 2012

dan tidak memberikan jawaban yang meragukan, maka nasabah termasuk kategori orang yang jujur dan dapat dipercaya. Namun apabila terdapat keraguan dalam memberikan jawaban, maka hal ini dapat merupakan indikasi awal itikad yang meragukan untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak Bank.

2) Bank Indonesia *Checking*

BI *checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI.

3) Bank *Checking*

Bank *checking* dilakukan secara personal antara sesama Bank maupun Bank lain yang pernah memberikan pembiayaan kepada nasabah. Apakah pernah mengalami tunggakan pembayaran pembiayaan atau tidak. Hal ini dapat menjadi tolak ukur bagi pihak Bank untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan.

4) *Trade Checking*

Analisa yang dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen.

b. Kapasitas

Untuk mengetahui kapasitas, kemampuan nasabah dalam memenuhi hutangnya, pada pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* ini Bank harus memperhatikan:

- a) Angka-angka hasil produksi
- b) Angka-angka penjualan dan pembelian
- c) Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya

- d) Data financial perusahaan beberapa tahun terakhir yang terlihat dari laporan keuangan.

c. Capital(modal)

Bagi pihak Bank untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon debitur terhadap usahanya maka Bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan Analisa Neraca sedikitnya 2 tahun terakhir
- b) Melakukan Analisa Ratio untuk mengetahui Likuiditasi, Solvabilitas, Rentabilitas dari perusahaan tersebut.

d. Kondisi

Bagi pihak Bank perlu untuk melihat kondisi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, dalam analisa ini yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah
- b) Kondisi usaha nasabah, perbandingan dengan usaha sejenisnya, dan lokasi wilayah usahanya
- c) Prospek usaha dimasa yang akan datang
- d) Keadaan pemasaran dari hasil usaha nasabah
- e) Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi prospek *industry* dimana nasabah terkait di dalamnya.

e. Jaminan

Pihak Bank dalam menganalisa jaminan yang diberikan oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan dilakukan dengan cara:

- a) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
- b) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan

- c) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu *relative* singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d) Ratio jaminan terhadap jumlah pembiayaan
- e) *Marketabilitas* jaminan, jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* suatu jaminan

Setelah melakukan analisa dengan metode-metode tersebut, pihak Bank juga perlu memperhatikan beberapa aspek yang menjadi salah satu tolak ukur dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Aspek Hukum

Dalam aspek hukum hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a) Bentuk, nama dan alamat usaha
- b) Susunan manajemen
- c) Bidang usaha

2. Aspek Ekonomi

Dalam aspek ekonomi hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a) Pemasaran dan keadaan harga dari usaha tersebut
- b) Persaingan usaha
- c) Jumlah penjualan dari tiap-tiap produk

3. Aspek Teknis

Dalam aspek teknis hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a) Bahan baku dan bahan pendukung yang dibutuhkan
- b) Bangunan dari usaha
- c) Sumber daya manusia (keahlian, pendidikan dan tingkat upah)

¹⁰Siska Andriani, account Officer, wawancara, tanggal 28 juni 2012

4. Aspek Yuridis

Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan nominal RP. 50.000.000,-. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah apakah semua persyaratan yang telah memenuhi ketentuan hukum termasuk perizinan usaha.

5. Aspek Kemanfaatan dan Kesempatan Kerja

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a) Manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat
- b) Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap
- c) Usahnya termasuk sector yang diprioritaskan oleh pemerintah.

6. Aspek Keuangan

Dalam aspek keuangan ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a) Neraca dan laporan laba/rugi
- b) Laporan yang meliputi sumber dan penggunaan modal usaha
- c) Rencana angsuran pembiayaan

Bank juga harus memperhatikan beberapa hal mengenai Jaminan yang diberikan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan modal usaha pada PT. Bank Riau Kepri Syariah seperti sebagai berikut:¹¹

a. Wewenang

Berhubungan dengan jaminan yang diberikan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan pada Bank. Pihak Bank harus mengetahui secara

¹¹Siska Andriani, account Officer, *wawancara*, tanggal 28 juni 2012

pasti mengenai kewenangan jaminan yang diserahkan. Apakah jaminan yang diberikan adalah milik nasabah yang mengajukan pembiayaan itu merupakan milik nasabah, atas nama nasabah atau jaminan atas nama orang lain.

b. Karakter

Pihak Bank juga harus memperhatikan karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan. Apakah nasabah merupakan pribadi yang bertanggung jawab, jika perlu pihak Bank dapat menghadirkan notaris agar pengikatannya menjadi lebih kuat.

c. Aspek Yuridis Tempat Usaha

Pihak Bank harus mengetahui secara pasti akan kelegalan tempat yang akan dijadikan jaminan atas pembiayaan modal usaha dan terdapat perlindungan hukum atas bangunan tersebut.

Dari hasil pemantauan *account officer* dilapangan dan sebagai bahan analisa maka *account officer* dengan ini membuat hasil pemantauannya yang disebut dengan Notisi, yang isinya mengenai:

- a) UP. Ulasan Pembiayaan yang isinya mengenai lokasi usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan, jumlah nominal pembiayaan yang diajukan apakah telah layak atau tidak.
- b) MP. Memorandum Pembiayaan, merupakan Notisi karakter nasabah atas kelayakan untuk diberikan pembiayaan setelah melakukan wawancara dan pendekatan lapangan.
- c) Analisa Kondisi Keuangan, data hasil dari analisis kondisi keuangan nasabah setelah *account officer* melakukan investigasi ke lapangan untuk melihat kemampuan nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam membayar hutang.

- d) Analisa Kondisi Usaha Nasabah, data mengenai hasil analisa *account officer* terhadap kondisi usaha nasabah yang berkaitan dengan berjalan lancar atau tidak usaha dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini juga bertujuan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank.

Setelah dokumen-dokumen terkumpul beserta dokumen *account officer* dari hasil pengamatan di lapangan, selanjutnya analisa pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dengan disetujui oleh pihak Pinsi Pemasaran/Pembiayaan. Apabila hasil analisisnya *negative* maka permohonan pembiayaan nasabah yang mengajukan pembiayaan ditolak oleh pihak Bank. Dan apabila hasil analisa dan *review* yang telah dilakukan oleh *account officer* tersebut ternyata positif maka akan dihasilkan sebuah proposal usaha yang kemudian ditindak lanjuti dalam proses persetujuan.

4. Tahapan Keempat Dari Proses Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad *Murabahah* adalah Persetujuan

Proses persetujuan merupakan proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah tergantung pada kebijakan Bank yaitu pada Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Syariah yang dalam hal ini juga dihadiri oleh Pinsi Pemasaran dan Pinsi Operasional.

Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Syariah merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, karena itu hasil dari Pimpinan adalah persetujuan, penolakan, penundaaan pembiayaan.¹²

5. Tahapan Kelima Dari Proses Pembiayaan Modal Usaha adalah Pengikatan Dengan Akad *Murabahah*

¹²Antho Indra Jaya, Pinsi Operasional, wawancara, tanggal 14 juni 2012

Dalam pengikatan ini, dokumen-dokumen yang telah disetujui tersebut diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperlukan sebagai proses realisasi surat-surat serta berkas di antaranya dengan membuat sebagai berikut:

- a) Surat perjanjian pembiayaan modal usaha berdasarkan akad *murabahah*
- b) Surat persetujuan pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah*
- c) Surat sanggup membayar hutang
- d) Tanda terima asli barang jaminan

Dalam pengikatan pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah*, terdapat 2 jenis pengikatan yaitu:

- a) Pengikatan di bawah tangan, merupakan proses penandatanganan akad yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah
- b) Pengikatan Notariel, merupakan proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh Notaris.

6. Tahapan Keenam Dari Proses Pembiayaan Modal Usahadengan Akad *Murabahah* Yaitu Pencairan

Pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah*, pihak Bank sudah menjelaskan mengenai margin yang akan didapatkan yang telah disesuaikan dengan nominal pembiayaan dan berdasarkan kebijakan PT. Bank Riau Kepri Syariah. Dalam hal pencairan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah dapat menggunakan cara dengan nasabah langsung datang ke Bank untuk mengambil dana pembiayaan modal usahanya yang telah disetujui dengan nominal tertentu atau pihak Bank akan mentransfer nominal dana ke rekening nasabah.



7. Tahapan Ketujuh Dari Proses Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah Adalah Proses Monitoring Terhadap Nasabah




Monitoring yang dilakukan oleh pihak Bank bertujuan agar pihak Bank mengetahui apakah nasabah yang mendapatkan pembiayaan tersebut, usahanya mengalami perkembangan atau tidak. Hal ini dilakukan juga agar pihak Bank dapat menyesuaikan sistem pembayaran hutang oleh nasabah. Contohnya terdapat gangguan sistem pembayaran oleh nasabah padahal usahanya lancar. Maka hal ini menjadi tidak sinkron dengan kesepakatan diawal antara pihak Bank dan nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Dengan terjadinya tunggakan pembayaran oleh nasabah maka pihak Bank akan melakukan sebagai berikut:

- a) Melakukan Surat Penagihan, untuk nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran selama 1 bulan.
- b) Interval surat 1 (pertama) dengan surat berikutnya adalah 14 hari atau 2 minggu.
- c) Jika surat tagihan tidak mendapat tanggapan dari nasabah hingga mencapai kolektibilitas 3, yaitu dimana nasabah mendapat cap DIRAGUKAN, maka Bank melakukan kunjungan kelapangan tentang apa sebenarnya kendala, hambatan nasabah dalam pembayaran hutangnya yang mengalami keterlambatan selama 2-3 bulan. Apabila masih dapat dibantu, pihak Bank akan membantu dalam kelonggaran pembayaran hutang. Dan bantuan berikutnya akan menggunakan akad yang baru seperti akad *mudharabah*.
- d) Apabila masih tidak ada tanggapan dan tindak lanjut dari pihak nasabah serta tidak dapat dibantu oleh pihak Bank walaupun telah semaksimal mungkin dan telah memasuki kolektibilitas 4 bahkan kolektibilitas 5 yaitu memasuki TAHAP PERHATIAN KHUSUS bahkan MACET, pihak Bank dengan terpaksa akan melanjutkan dengan *eksekusi jaminan*.¹³



¹³ Anthon Indra Jaya, Pinsi Operasional, wawancara, tanggal 14 juni 2012






































Berdasarkan keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ajaran Islam dianjurkan untuk memberikan toleransi atau memberi tangguh bagi orang yang kesulitan untu membayar hutang. Begitu juga hal ini berlaku untuk nasabah yang mendapat pembiayaan dari Bank dan mengalami kendala dalam pembayaran pembiayaannya, Bank juga dianjurkan memberikan tangguh kepada nasabah tersebut.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), Cet. ke-8, hal. 44.

B. Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah

Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah terdapat berbagai pembiayaan, yang termasuk di dalamnya terdapat pembiayaan modal usaha. Dari angket yang penulis sebarakan dapat diketahui bahwa lebih dari 50% responden mengetahui informasi mengenai pembiayaan modal usaha dari teman kerabat. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Tanggapan Responden Tentang Sumber Informasi Pembiayaan Modal Usaha PT. Bank Riau Kepri Syariah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Teman dan kerabat	14	51,9%
2	Media massa	6	22,2%
3	Karyawan/ti PT. Bank Riau Kepri Syariah	7	25,9%
	Jumlah	27	100%

Sumber : hasil olahan data lapangan,2012.

Dari tabel di atas terlihat bahwa 14 responden (51,9%) mengakui bahwa informasi pembiayaan modal usaha pada PT. Bank Riau Kepri Syariah diperoleh dari teman dan kerabat, kemudian 6 responden (22,2%) mengakui bahwa informasi pembiayaan modal usaha pada PT. Bank Riau Kepri Syariah diperoleh dari media massa, sedangkan 7 (25,9%) responden mengakui bahwa memperoleh informasi tentang pembiayaan modal usaha dari karyawan/ti PT. Bank Riau Kepri Syariah.

Dari tanggapan melalui angket yang disebarakan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa para calon nasabah maupun nasabah memperoleh informasi tentang pembiayaan modal usaha pada PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah informasi yang cenderung diperoleh dari teman dan kerabat. Dari informasi yang didapat calon nasabah maupun nasabah tertarik untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa yang melatar belakangi calon nasabah maupun nasabah untuk menjalin hubungan mitra usaha dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru. Dalam hal ini tanggapan calon nasabah

maupun nasabah akan ketertarikan untuk menjalin hubungan mitra usaha dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2
Tanggapan Responden Tentang Ketertarikan Mereka Untuk Menjalिन Hubungan Mitra Usaha Dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sesuai syariah	9	33,3%
2	Pelayanan operasionalnya baik	12	44,5%
3	Marginnya jelas	6	22,2%
	Jumlah	27	100%

Sumber : hasil olahan data lapangan,2012.

Dari tabel diatas terlihat bahwa 9 responden (33,3%) mengakui bahwa tertarik untuk menjalin hubungan mitra usaha dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah disebabkan oleh prinsip yang digunakan sesuai syariah, kemudian 12 responden (44.5%) mengakui ketertarikan muncul disebabkan oleh pelayanan operasional yang baik pada PT. Bank Riau Kepri Syariah, sedangkan 6 responden (22.2%) mengakui bahwa ketertarikan muncul disebabkan oleh margin pada PT. Bank Riau Kepri Syariah jelas.

Dengan disebarkannya angket oleh penulis dapat disimpulkan bahwa ketertarikan yang muncul dari calon nasabah maupun nasabah mayoritas disebabkan oleh pelayanan operasionalnya yang baik dari PT. Bank Riau Kepri Syariah. Setelah muncul ketertarikan calon nasabah maupun nasabah untuk menjalin mitra usaha dengan PT. Bank Riau Kepri Syariah dapat kita lihat apakah pihak nasabah mengalami kesulitan dalam proses pengajuan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3
Tanggapan Responden Tentang Proses Pembiayaan Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mudah	16	59,3%
2	Sulit	9	33,3%
3	Sangat sulit	2	7,4%
	Jumlah	27	100%

Sumber : hasil olahan data lapangan,2012.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 16 responden (5,9,3%) mengakui bahwa proses pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah mudah, karena nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada Bank Riau Kepri Syariah telah memiliki surat-surat yang menjadi persyaratannya. Kemudian sebanyak 9 responden (33,3%) merasa kesulitan dalam pengajuan pembiayaan ini karena mereka perlu membuat surat-surat yang menjadi persyaratannya tetapi tidak ada beban yang lebih karena persyaratan tersebut masih dianggap wajar. Sedangkan 2 responden (7,4%) merasa sangat kesulitan karena nasabah tersebut dalam memenuhi syarat-syarat pada poin perizinan usaha mengalami kendala, belum memiliki izin usaha yang resmi dari kelurahan setempat. Selanjutnya tanggapan nasabah mengenai keadaan usahanya sebelum mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Tanggapan Responden Tentang Keadaan Usahannya Sebelum Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Modal Usaha Dari PT. Bank Riau Kepri Syariah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Biasa saja	11	40,8%
2	Berkembang	10	37%
3	Mengalami kemajuan	6	22,2%
	Jumlah	27	100%

Sumber : hasil olahan data lapangan,2012.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa 11 responden (40.8%) mengakui bahwa keadaan usahanya sebelum mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah biasa saja, hal ini disebabkan oleh kurangnya modal untuk dapat bersaing di pasaran, kemudian 10 responden (37%) mengakui bahwa keadaan usahanya sebelum mendapat pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah berkembang tetapi masih ada kebutuhan lain sebagai penunjang usahanya maju belum terpenuhi sehingga mengajukan permohonan pembiayaan. Sedangkan 6 responden (22.2%) mengakui bahwa keadaan usahanya sebelum mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syariah sudah dalam keadaan maju, tetapi nasabah ingin melakukan inovasi dalam usahanya dan memerlukan

tambahan biaya sehingga mengajukan pembiayaan modal usaha pada PT. Bank Riau Kepri Syariah.

Berikut ini tanggapan nasabah setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah.

Tabel IV.5
Tanggapan Responden Tentang Usahanya Setelah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Dari PT. Bank Riau Kepri Syariah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Biasa saja	8	29,7%
2	Berkembang	10	37%
3	Mengalami kemajuan	9	33,3%
	Jumlah	27	100%

Sumber : hasil olahan data lapangan, 2012.

Dapat terlihat pada tabel diatas bahwa 8 responden (29,7%) mengakui bahwa keadaan usahanya setelah mendapat pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah masih dalam keadaan biasa saja, hal ini disebabkan oleh usaha nasabah kurang dapat bersaing di pasaran. Kemudian 10 responden (37%) mengakui bahwa usahanya setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah berkembang, hal ini disebabkan oleh nasabah dapat memaksimalkan usahanya agar dapat bersaing di pasaran. Sedangkan 9 responden (33,3%) mengakui bahwa keadaan usahanya setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah mengalami kemajuan, hal ini disebabkan oleh nasabah melakukan inovasi dalam usahanya dan dapat diterima oleh konsumen sehingga menarik konsumen lainnya. Setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syariah bukan hanya akan berdampak pada sektor usaha saja, akan tetapi juga berdampak pada perekonomian keluarga. Pihak Bank sendiri memberikan pembiayaan bertujuan untuk mengubah perekonomian nasabah menjadi lebih baik. Dalam hal ini tanggapan nasabah mengenai keadaan perekonomian keluarga setelah mendapatkan bantuan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah.

Tabel IV.6
Tanggapan Responden Tentang Keadaan Ekonomi Keluarganya Setelah Memperoleh Pembiayaan Modal Usaha Dari PT. Bank Riau Kepri Syariah

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	14	51,8%
2	Baik	12	44,5%
3	Kurang baik	1	3,7 %
	Jumlah	27	100%

Sumber : hasil olahan data lapangan,2012.

Dari tabel diatas terlihat bahwa 14 responden (51,8%) mengakui bahwa keadaan ekonomi keluarga setelah mndapat bantuan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah dalam keadaan yang sangat baik, hal ini disebabkan karena pendapatan dari usaha nasabah tersebut menunjang perekonomian keluarga meenjadi lebih baik. Kemudian 12 responden (44,5%) mengakui bahwa keadaan ekonomi keluarga setelah mendapatkan bantuan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah dalam keadaan yang baik,. Sedangkan untuk 1 responden (3,7%) mengakui bahwa keadaan ekonomi keluarga setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah adalah kurang baik, hal ini disebabkan tidak semua pendapatan dari usahanya dapat mempengaruhi perekonomian keluarganya karena nsabah yang mendapatkan pembiayaan tersebut tidak memaksimalkan pembiayaan yang dibewrikan untuk usaha, yang dari usahanya tersebut akan memberi dampak positif untuk kesejahteraan ekonomi keluarga. Selanjutnya data pembiayaan dihubungkan dengan kesejahteraan nasabah pengaju pembiayaan menggunakan chi square dengan bantuan spss yang hasilnya sebagai berikut:

TABEL IV.7

Kesejahteraan

	Observed N	Expected N	Residual
1.00	2	9.0	-7.0
12.00	9	9.0	.0
14.00	16	9.0	7.0
Total	27		

Test Statistics

	Kesejahteraan
Chi-Square ^a	10.889
df	2
Asymp. Sig.	.004

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 9.0.

Dari hasil analisa di atas menunjukkan nilai chi hitung sebesar 10.889 lebih besar dari chi table sebesar 5,991 untuk level of signifikansi sebesar 9,210. Maka terdapat pengaruh antara pembiayaan yang telah diberikan untuk nasabah dengan perkonomian keluarga setelah mendapat pembiayaan.

Adapun indikator-indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi nasabah meningkat atau lebih baik dari sebelumnya:

- 1) Sebelumnya nasabah tidak mampu membeli mobil namun setelah usahanya lancar berkat pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah, yang akhirnya nasabah mampu membeli mobil.
- 2) Sebelumnya nasabah hanya berangan-angan untuk membeli suatu barang yang dapat menunjang kemajuan usahanya dengan tunai, namun setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah keinginan nasabah tercapai.
- 3) Sebelumnya usaha nasabah yang dijalankan kurang begitu berkembang disebabkan terbatasnya dana dan peralatan termasuk didalamnya mesin produksi, namun setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari PT. Bank Riau Kepri Syariah usaha nasabah mengalami perkembangan lebih baik bahkan mengalami kemajuan, hal ini disebabkan karen nasabah benar-benar memaksimalkan pembiayaan modal yang diberikan oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.¹⁶

Pembiayaan modal usaha ini sebenarnya akan sangat membantu bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan modal usaha pada perkembangan usahanya, jika semua dananya

¹⁶ Anthon Indra Jaya, Pinsi Operasional, wawancara, tanggal 14 juni 2012

dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang hasilnya juga akan berpengaruh pada perekonomian keluarga yang lebih baik.

Pembiayaan modal usaha yang ada pada PT. Bank Riau Kepri Syariah dalam proses pengajuan pembiayaannya tidak terlalu sulit, karena data-data yang diperlukan merupakan data yang hampir sudah dimiliki oleh nasabah yang memiliki usaha yang mengajukan pembiayaan. Dengan data-data tersebut pihak Bank akan melakukan beberapa tahap untuk menyeleksi pengajuan pembiayaan nasabah yang akan disetujui, serta Bank akan selalu mengawasi perkembangan usaha nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal usaha. Jika terjadi kendala dalam system pembayaran pembiayaan oleh nasabah, Bank akan melakukan kebijakan dalam beberapa tahap dan akan memberikan perpanjangan waktu. Jika nasabah yang mendapat pembiayaan mengalami kendala dalam pembayarannya Bank akan menyita barang jaminan/agunan jika nasabah tersebut sudah tidak dapat mengikuti kebijakan Bank. Dampak positif dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yaitu kemajuan usaha dan kesejahteraan keluarga, hal ini disebabkan karena nasabah benar-benar mengoptimalkan dana pembiayaan yang dipinjamkan untuk usaha tau produktif bukan digunakan untuk konsumtif Sementara dampak negatifnya adalah tidak adanya perubahan, kemajuan dalam usaha nasabah tersebut yang disebabkan dana pembiayaan digunakan untuk konsumtif sehingga usaha nasabah tidak mengalami kemajuan dan berdampak baik pada perekonomian keluarga.

Dalam pandangan islam mengenai pembiayaan ini sudah sesuai dengan syariat islam karena pembiayaan yang berjalan selama ini pada PT. Bank Riau Kepri Syariah prakteknya jika nasabah mengalami kendala dalam pembayaran maka pihak Bank akan memberikan tangguhan waktu tertentu yang sesuai dengan Hadist Ibnu Majjah No 2280 sebagai berikut:

اجل والمقارضة واخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

¹⁸Mahmud Yunus, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), Cet. ke-8, hal. 44.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. Bank Riau Kepri Syariah memiliki berbagai macam pembiayaan. Salah satunya pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah*, PT. Bank Riau Kepri Syariah dalam memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah melalui 7 tahap yaitu permohonan, pengumpulan data, investigasi, pengikatan, persetujuan, pencairan dan monitoring. Pihak Bank akan menetapkan ketentuan kepada pihak nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha kepada Bank berupa surat jaminan, termasuk SK bagi PNS. Setelah penyerahan surat jaminan pihak nasabah dapat mengisi formulir pembiayaan dan akan melalui proses selanjutnya sesuai ketentuan Bank. Mengenai berhasil atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan dari Bank merupakan keputusan mutlak Bank sesuai kebijakan yang telah ada.
2. Setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Riau Kepri Syariah terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya jika nasabah mengoptimalkan dana yang dipinjamkan untuk usaha maka usahanya dapat maju serta lebih menyejahterakan perekonomian keluarga. Dampak negatifnya karena dana yang dipinjamkan digunakan untuk konsumtif sehingga usaha nasabah tidak berkembang dan tidak menyejahterakan perekonomian keluarga.

B. Saran

Sebelum penulis mengakhiri, penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian ini.

Maka penulis menyarankan:

- a) PT. Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru tetap menjalankan sistem tanpa denda terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran, pelunasan pembiayaan yang sudah diberikan. Tetapi tetap sesuai kebijakan Bank akan menyurati pihak nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran pembiayaan. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam yang memberi perpanjangan waktu jika si peminjam dana mengalami kendala (QS. Al-Baqarah :280).
- b) Bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal usaha agar dapat mengoptimalkan dana yang sudah ada untuk produksi usahanya, hal ini ditegaskan karena banyak nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal usaha, hanya beberapa persen dari dananya untuk produksi selebihnya digunakan untuk konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: The Internasional Institute Of Islamic Thought, 2002)
- Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, (CV Tifa Surya Indonesia, 2006)
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendekia Press, 2005)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No. 102 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Murabahah* (Jakarta: 2007)
- Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Mahmud Yunus, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: pt. Al-Ma'arif, 1983)
- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005)
- Muchdarsyah Sinungan, *Menejement Dana Bank*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000)
- M. Luthfi Hamidi, *jejak-jejak ekonomi syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003)
- M. Nur Rianto Al-arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta : ALFABETA, CV, 2010)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: TazkiaCendekia, 2001)
- Nazar, Bakri, *Problematika Fikih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi: Keangan Syari'ah, Konsep Dan Implementasi: PSAK Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI, 2008)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : _____ akim, 2007)
- Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985)

Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 : Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Undang-Undang Perbankan Syariah 2008, UU RI No. 21 Th 2008 (Jakarta : Sunan Grafika, 2009)

Winarno Surachmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 1985)

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)

Zainuddin Ali, *hukum perbankan syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

Zubairi Akbar, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)